

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaporan keuangan adalah laporan terstruktur tentang posisi dan transaksi keuangan suatu entitas. Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kurangnya pelaporan keuangan berkualitas tinggi menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Selain itu, lemahnya akuntabilitas dan transparansi menunjukkan kelemahan kelembagaan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap budaya korupsi sistemik. Salah satu cara untuk mengurangi hal ini adalah dengan mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Hamsinar, 2022).

Saat ini, terdapat peningkatan permintaan akan peran akuntansi dalam pelayanan publik di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah kepada masyarakat, memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat melalui pelaporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk Kepentingan Masyarakat PP No 71 Tahun 2010. (Imelia et al., 2021).

Laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh hasil evaluasi setiap tahun berupa penilaian (Opini) dari auditor pemerintah yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK). Opini tersebut dapat menggambarkan kualitas baik atau buruk dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (Empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yakni opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak memberi pendapat (TMP), dan opini tidak wajar (TW).

Fenomena Terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan APBD tahun 2023 di Kota Bandar Lampung. Dari data yang di laporkan dalam laporan pertanggungjawaban walikota Bandar Lampung menyebutkan belanja daerah pada tahun anggaran 2023 di anggarkan sebesar 2.927.770.619.245 dan dapat di realisasikan sebesar 2.277.647.622.683,33 dari anggaran tersebut terdapat anggaran yang begitu besar dan di duga fiktif, salah satunya di sekretariat daerah sebesar 125.706.917.057,60. LCW menduga terdapat dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kemungkinan adanya penyalahgunaan dana publik terkait anggaran belanja pada sekretariat daerah di duga fiktif dengan jumlah yang fantastis. Dan adanya ketidak sesuaian antara alokasi anggaran dengan penggunaan yang sebenarnya sehingga menimbulkan indikasi penggelapan atau penyelewengan dana publik. Dugaan tindak pidana korupsi ini mengindikasikan kemungkinan terjadinya praktik korupsi di dalam proses pengalokasian dan penggunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pelayanan umum. Potensi penyimpangan anggaran sebesar itu menimbulkan kecurigaan bahwa ada pihak-pihak yang secara sengaja memanfaatkan posisi atau kewenangan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan cara yang tidak sah (Kupastuntas.com, 2024).

Kota Bandar Lampung memperoleh opini Wajar dengan pengecualian (WDP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada tahun 2022 dari BPK RI perwakilan Lampung. Pemerintah Kota sendiri terakhir mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2019. Artinya selama 3 tahun berturut-turut sejak 2020-2022 pemerintah Kota Bandar Lampung memperoleh opini WDP. Opini ini dinilai berdasarkan kesesuaian atas Undang - Undang, lalu Standar Pengendalian internal yang memadai dan menyesuaikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar. Opini WDP ini dikarenakan 3 hal, yang pertama karena penggunaan pendapatan yang dianggap tidak rasional, kedua karena besarnya hutang belanja dan ketiga karena besarnya penggunaan dana yang sudah ditentukan penggunaannya.

Pada tahun 2021 Dasar opini Wajar Dengan Pengecualian ini didasari oleh beberapa hal yaitu yang pertama pada ketidak sesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang –

Undangan. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak dapat menyajikan rincian nilai atas penggunaan dana tersebut dalam laporan keuangan Per tanggal 31 desember 2021. Dasar opini yang ke dua yaitu nilai utang belanja modal disajikan berdasarkan berita acara .penilaian kemajuan fisik pekerjaan, namun berdasarkan nilai kontrak. Dan penghapusan kewajiban utang belanja tanpa di dukung perjanjian formal dengan pihak yang berpiutang serta terdapat kegiatan tahun 2021 belum dibayar yang seharusnya merupakan kewajiban, namun tidak diakui sebagai utang belanja hal ini berdampak pada penyajian konstruksi dalam pengerjaan. selain itu nilai utang belanja yang terdiri atas kewajiban atas kegiatan tahun 2021 dan tahun 2019-2020 juga tidak dapat dibayarkan karena ketidak cukupan dana di kas daerah.

Pada tahun 2022 Kota Bandar Lampung kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dasar opini ini dikarenakan ketidakpatuhan dalam penganggaran pendapatan asli daerah tahun 2022 yang tidak berdasarkan perkiraan terukur secara rasional dan ketidakpatuhan dalam penganggaran penerimaan pinjaman daerah yang tidak didukung sumber penerimaan yang jelas serta penerbitan surat penyediaan dana (SPD) untuk pelaksanaana belanja tidak sesuai ketersediaan dana di kas daerah.

Pada tahun 2023 Kota Bandar Lampung akhirnya mendapatkan opini Wajar tanpa pengecualian namun masih terdapat penekanan pada suatu hal yaitu anggaran pendapatan asli daaerah (PAD) dianggarkan secara tidak rasional karena tidak mempertimbangkan potensi pendapatan yang dapat diperoleh. Tingginya penganggaran PAD yang tidak diimbangi dengan pengendalian belanja mengakibatkan nilai utang belanja yang besar sehingga berdampak timbulnya defisit keuangan rill. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu melakukan penganggaran PAD yang rasional serta tetap meningkatkan pengendalian dan menerapkan skala prioritas dalam merealisasikan belanja untuk mengurangi defisit keuangan Rill. defisit keuangan Rill merupakan selisih antara dana yang tersedia untuk belanja dalam satu tahun dengan total realisasi belanja ditambah pengeluaran pembiayaan dan utang belanja jangka pendek, <https://lampung.bpk.go.id/lhp-lkpd/>.

Beberapa variabel dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Variabel pertama yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan tindakan tanggung jawab pemerintah yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemangku kepentingan telah memenuhi kewajibannya secara akurat (Yaya & Wahyuli, 2019). Salah satu bentuk akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk menggunakan media pertanggungjawaban secara berkala untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan operasinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Kurniawati & Sadeli, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Khikmah et al., 2024) menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Variabel kedua yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah transparansi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi adalah prinsip keterbukaan dan keaslian yang memungkinkan orang pada umumnya untuk mengetahui secara transparan dan lengkap kewajiban otoritas publik untuk mengawasi aset yang dipercayakan sesuai pedoman melalui perencanaan laporan keuangan daerah. Pihak yang berkepentingan harus memahami dan dapat mengakses data pemerintah. Organisasi sektor publik yang tidak transparan akan menyebabkan penyalahgunaan sumber daya dan penyelewengan tugas, terutama dalam laporan keuangan (Pratiwi et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Khikmah et al., 2024) Menyimpulkan bahwa Transparansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah.

Variabel ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran merupakan peran individu atau sumber daya manusia dalam penentuan anggaran pemerintah yang akan berpengaruh pada proses evaluasi dan kontrol kerja pemerintahan serta meminimalkan penyelewengan (Pratiwi et al., 2022) Masukan yang diberikan sumber daya manusia dalam penyusunan arah maupun kebijakan anggaran akan mewujudkan anggaran yang efektif. Semakin tinggi partisipasi anggaran, kualitas laporan keuangan pemerintah meningkat. Penelitian ini

sejalan dengan yang dilakukan oleh (Hamsinar, 2022) yang menyimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2022) Menyimpulkan bahwa Partisipasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah

Variabel keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Kuntadi et al., 2022) Menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah

Variabel ke lima yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kehadiran Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan, dimana Sumber Daya Manusia adalah kemampuan fisik dan mental setiap individu, perilaku dan karakteristik yang ditentukan oleh lingkungan dan genetik, atau prestasi yang memuaskan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan atau pelatihan yang pernah diikuti seseorang serta keterampilan yang tercermin dalam pelaksanaan tanggung jawab dan uraian tugasnya. Kompetensi adalah karakteristik penting yang dimiliki seseorang yang memungkinkan mereka untuk bekerja dengan baik. UU No 13/2003 mendefinisikan Kompetensi sebagai kemampuan kerja individu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memenuhi standar yang telah ditetapkan (Imelia et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Kuntadi et al., 2022) Menyimpulkan bahwa Kompetensi SDM Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya Kota Bandar Lampung yang telah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama beberapa tahun berturut-turut. Penelitian ini akan mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi anggaran, sistem pengendalian internal dan Kompetensi SDM, yang sangat relevan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran daerah dan mencegah potensi korupsi. Penelitian ini mempunyai peran strategis dalam memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien, tetapi juga berkontribusi dalam pencegahan penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan negara.

Kualitas Laporan keuangan dalam lembaga pemerintah sangat penting untuk mendorong pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien. Pelaporan keuangan yang efektif membantu mencegah penyalahgunaan dana publik, meningkatkan kepercayaan publik, dan memungkinkan penilaian kinerja lembaga pemerintah. Lebih jauh, pelaporan yang akurat memfasilitasi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang relevan oleh badan pemerintah. Melalui pelaporan yang jelas dan dapat diandalkan, pemerintah dapat menunjukkan pemanfaatan anggaran yang sejalan dengan tujuannya, menegakkan stabilitas ekonomi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini Merupakan Replikasi dari Penelitian (Khikmah et al., 2024). Adapun Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya Yaitu Penambahan Variabel Partisipasi Anggaran, Dikarenakan partisipasi anggaran mencerminkan keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran, baik itu pegawai pemerintah maupun masyarakat. Partisipasi anggaran dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan. Teori yang digunakan, yaitu *theory stewardship*, dan Lokasi

Penelitian yang dilakukan adalah di OPD Kota Bandar Lampung serta tahun penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2024. Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang penelitian ini, Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan permasalahan tersebut menjadi topik yang menarik untuk diteliti, sehingga peneliti mengambil tema yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Anggaran, sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah”**

### **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian memfokuskan penelitiannya pada OPD yang berada di Kota Bandar Lampung. Dalam ruang lingkup penelitian ini adalah menguji pengaruh dari variabel Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi anggaran, Sistem pengendalian internal dan Kompetensi SDM pada OPD yang berada di Kota Bandar Lampung.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Partisipasi anggaran terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki laporan keuangan agar tidak ada celah bagi pegawai pemerintah daerah untuk melakukan penyimpangan.
2. Bagi penelitian selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan sumbangan literatur serta referensi bagi penelitian selanjutnya terkhusus yang membahas pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi anggaran, sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulis menggunakan sistem penulisan berikut untuk memberikan gambaran penelitian yang lengkap, dengan informasi dalam setiap bab yaitu :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori utama yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang menjadi kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah, serta memaparkan tentang penelitian terdahulu dan bangunan hipotesis terkait dengan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi penjelasan tentang sumber data, metode pengumpulan dalam populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi data, hasil penelitian data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**